

SKRIPSI

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DI SUMATERA BARAT PASCA KRISIS EKONOMI PADA TAHUN 2000-2010

Oleh:

RISWANDI

06 151 151



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran di Sumatera Barat Pasca Krisis Ekonomi

Pada Tahun 2000-2010

Skripsi S1 oleh: Riswandi Pembimbing Skripsi: Edi Ariyanto, SE, M.Si

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran pasca krisis ekonomi di Sumatera Barat periode 2000 hingga 2010. Adapun variabel-variabel yang dianalisis adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y_d), Pertumbuhan Penduduk (J_p), Investasi Swasta (I_s), dan Upah Minimum Regional (w). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana hubungan variabel Y_d , J_p , I_s , dan w serta untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah dan memberikan langkah kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran, sedangkan variabel lainnya yaitu pertumbuhan penduduk dan investasi swasta memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Sumbar perlu meningkatkan Kesempatan kerja melalui upaya peningkatan lapangan usaha dan keterampilan pekerja, penanaman modal disektor industri hendaknya bersifat padat karya. Dengan pengoptimalan sumber-sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat pendidikan yang bervariasi dan dapat dilatih sesuai dengan keinginan pasar kerja, maka selain akan meningkatkan pendapatan daerah juga akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu, keamanan berinvestasi baik ditinjau dari pihak masyarakat maupun pemerintah di daerah juga menjadi penentu mau atau tidaknya investor melakukan investasi dengan menjaga isu-isu tentang daerah baik isu social, ekonomi maupun politik yang akan mempengaruhi perkembangan investasi di daerah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki potensi pasar yang cukup besar dilihat dari sisi input tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar dapat menggerakkan pasar dari sudut permintaan melalui *multiplier effect* karena adanya *aggregat demand* yang tinggi. Sebagai sumber tenaga kerja, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi penggerak perekonomian dari sisi penawaran. Namun kenyataannya yang dihadapi hingga saat ini, jumlah penduduk dan tenaga kerja yang besar tidak menjadi aset potensial yang dapat dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi melainkan secara tidak langsung menjadi beban negara dalam pembangunan. Ada dua pandangan mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi. Pandangan pertama mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pandangan kedua mengatakan bahwa penduduk yang besar merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi. Namun pada akhirnya persoalan penduduk merupakan beban atau modal pembangunan ekonomi, persoalannya bukan semata-mata terletak pada besar kecil jumlahnya. Akan tetapi, juga tergantung pada kualitas dan kapasitas penduduk itu sendiri (Sofyardi, 1999).

Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan

perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauh dari keseimbangan semula. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

Salah satu masalah yang cukup serius dihadapi Indonesia dewasa ini adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Jumlah penganggur dan setengah penganggur mengalami peningkatan. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004).

Perkembangan ekonomi akan diikuti oleh perubahan output dan masalah ketenagakerjaan, dimana pada kondisi ini sektor primer akan semakin berkurang peranannya, sejalan dengan perkembangan yang pesat dari sektor-sektor lainnya seperti sektor industri dan jasa. Hal ini akan membawa kecenderungan bahwa tenaga kerja yang terdapat pada sektor primer akan berpindah ke sektor lain yaitu industri dan jasa (Ritonga, 2003).

Indonesia merupakan negara berkembang yang berpendapatan masih rendah. Prioritas pembangunan di Indonesia haruslah pada program peningkatan sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan dan kesehatan. Elfindri (2001) menyatakan bahwa agar dampak dari globalisasi tidak dirasakan negatif oleh yang tidak berpendidikan, strategi pembangunan dan pembinaan perlu disesuaikan secara cepat. Strategi tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun pihak rumah tangga, sebagai pengambil keputusan untuk mempersiapkan generasi masa mendatang, perlu melakukan penyesuaian orientasi investasi.

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Data survey penduduk antar sensus (SUPAS) tahun 2005 memperlihatkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 219,85 juta jiwa. Otomatis jumlah angkatan kerja di Indonesia juga akan meningkat karena jumlah angkatan kerja ini berhubungan positif dengan banyaknya jumlah tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun yang sama yaitu berjumlah 105,80 juta jiwa. Di Provinsi Sumatera Barat jumlah penduduk pada tahun 2010 sudah mencapai 4.845.998 jiwa dan jumlah angkatan kerja sebanyak 2.194.040 jiwa (BPS, 2010).

Jumlah penduduk yang besar merupakan keunggulan bagi Indonesia dalam hal penyediaan tenaga kerja. Namun hal ini juga memberikan dampak berupa tersedianya angkatan kerja yang besar. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai

cara(Tambunan, 2001).

Ketika krisis mulai terjadi pada akhir tahun 1997 yang ditandai dengan meningkatnya nilai mata uang dolar, hal ini sangat berpengaruh terhadap harga barang di pasar domestik terutama barang impor kebutuhan pokok. Akibat dari terdepresiasi nilai rupiah tersebut, harga barang terus meningkat. Gejala lain yang terjadi di bidang ekonomi, di antaranya melemahnya kegiatan dunia usaha, menurunnya upah riil, menurunnya pendapatan perkapita, menurunnya daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi negatif serta tingginya angka inflasi terutama pekerja di sektor formal, yang berdampak meningkatnya pengangguran akibat semakin minimnya lapangan pekerjaan dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal beberapa perusahaan dan industri yang berhenti beroperasi karena tingginya biaya produksi akibat depresiasi rupiah.

Gejala tersebut yang membuat perekonomian Indonesia yang ditinjau secara makro dan mikro tidak menguntungkan dan sangat berpengaruh terhadap tingkat produktifitas, sehingga menghantarkan Indonesia masuk kedalam kelompok negara-negara berkembang, seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Todaro (2000) bahwa: *“Ciri-ciri dari negara berkembang adalah standar hidup yang rendah, dengan produktivitas yang rendah (low level of productivity).*

Krisis ekonomi pada 1997 juga berdampak pada perekonomian di Sumatera Barat. Setelah mengalami keterpurukan yang cukup parah pasca tahun 1998, mulai tahun 1999 perekonomian Sumatera Barat mulai memperlihatkan kebangkitan kembali. Namun secara umum, tren pertumbuhan ekonomi tersebut

belum kembali seperti sebelum masa krisis. Pertumbuhan ekonomi yang lambat pulih tersebut diiringi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang masih rendah.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan dan hasil hutan. Di Sumatera Barat laju pertumbuhan ekonomi juga meningkat, yaitu sebesar 5,93% pada tahun 2010 dibanding dengan tahun 2009. Jumlah penduduk sebesar 4,85 juta jiwa dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 3,31 juta jiwa (2010). Jumlah angkatan kerja sebesar 66,36% dari penduduk usia produktif (2,19 juta jiwa). Sementara penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 33,064% dari penduduk usia produktif (1,11 juta jiwa) dan Jumlah pengangguran (2010) sebanyak 152,59 ribu jiwa (www.sumbarprov.go.id).

Laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat sendiri dalam periode 2000-2010 telah meningkat sebesar 14,82% (625,67 ribu jiwa). Namun di pasar kerja pengangguran dari segi penawaran cenderung meningkat yang menunjukkan terdapatnya kelebihan tenaga kerja.

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Sumatera Barat yang apabila tidak diiringi dengan penciptaan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Hal ini membawa berbagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran untuk memenuhi permintaan hidup masyarakat seperti sandang, pangan, prasarana kesehatan, pendidikan dan juga dalam hal penyediaan lapangan kerja, sehingga dituntut peranan pemerintah daerah dan masyarakat yang lebih besar.

Agar kesempatan kerja meningkat, maka pengeluaran pemerintah harus diarahkan kepada penyediaan *social over head* dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Pengeluaran seperti itu akan menciptakan lapangan kerja dan efisiensi produktifitas ekonomi. Investasi dari pihak swasta juga menentukan kegiatan produksi atau ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain ditentukan oleh besarnya investasi, kesempatan kerja juga ditentukan oleh tingkat upah. Tingkat upah yang rendah akan mendorong perluasan kesempatan kerja.

Kesempatan kerja ini juga akan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, angkatan kerja dan kebijaksanaan kesempatan kerja itu sendiri. Keseluruhan faktor-faktor ini, secara langsung atau tidak langsung, akan dipengaruhi pula oleh berbagai faktor-faktor internasional, baik ekonomi maupun politik (Tjiptoherijanto, 1996).

Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia harus bekerja atau melakukan aktivitas ekonomi. Tetapi berdasarkan kenyataan yang ada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dari jumlah angkatan tenaga kerja yang ada. Akibat dari banyaknya penawaran tenaga kerja, akan banyak terjadi pengangguran karena jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak termanfaatkan. Sektor industri yang diharapkan dapat menyerap atau dapat menyediakan lapangan kerja ternyata tidak begitu berhasil baik. Sempitnya lapangan kerja ini disebabkan sektor industri tidak dapat menyerap tenaga kerja yang ada di daerah perkotaan. Banyak perusahaan pada saat krisis menutup usahanya karena tingginya biaya produksi, atau pilihan yang diambil oleh banyak perusahaan dengan jalan

mengurangi jumlah tenaga kerja dan bisa juga dengan mengubah penggunaan modal dari yang padat karya menjadi padat modal (efisiensi biaya produksi). Fenomena diatas disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia dari sejak pertengahan tahun 1998. Dampak krisis ini berdampak langsung pada tingkat pengangguran yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

Meskipun pengangguran telah mengganggu kapitalisme sejak Revolusi Industri, akan tetapi setiap usaha untuk memahami penyebab serta biaya yang ditimbulkannya, sejauh ini hanya dimungkinkan dengan semakin berkembangnya teori makroekonomi. Sekarang mulai terlihat bahwa resesi dan pengangguran yang tinggi menimbulkan beban yang amat besar terhadap perekonomian (Samuelson, 1992).

Faktor tingkat upah masuk ke dalam penelitian ini karena secara teoritis permintaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat upah. Ditinjau dari faktor upah, selama ini masalah yang sering timbul dalam hal pengupahan adalah adanya perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja. Sehingga dalam hal ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut. Perbaikan upah berarti peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro mendorong perusahaan untuk berkembang.

Berdasarkan kenyataan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Sumatera Barat Pasca Krisis Ekonomi pada Tahun 2000-2010”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang kondisi dan situasi diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah dampak pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, investasi swasta, dan tingkat upah minimum regional (UMR) terhadap pengangguran di Sumatera Barat pada tahun 2000-2010.
2. Bagaimanakah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, investasi swasta, dan tingkat upah minimum regional (UMR) secara bersama-sama dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di Sumatera Barat pada tahun 2000-2010.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, investasi swasta, dan tingkat upah minimum regional (UMR) terhadap pengangguran di Sumatera Barat pada tahun 2000-2010.
2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, investasi swasta dan tingkat upah minimum regional (UMR) secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pengangguran di Sumatera Barat pada tahun 2000-2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah dan lembaga lainnya sebagai masukan dalam memecahkan masalah pengangguran di Sumatera Barat.
2. Sebagai wahana bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai konsep-konsep teori yang diperoleh terhadap pembahasan permasalahan yang ada.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan tercapai sasaran yang hendak dituju, maka ruang lingkup pembahasan perlu ditetapkan. Dalam penulisan ini penulis akan memberi batasan data yang digunakan adalah data sekunder berupa *time series* mulai dari tahun 2000 sampai 2010. Pengangguran yang terdapat di Sumatera Barat menjadi variabel tidak bebas, sedangkan upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, investasi swasta serta pertumbuhan penduduk Sumatera Barat menjadi variabel bebas.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1 : **PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : KERANGKA TEORI

Membahas tentang tinjauan pustaka yang memuat landasan teori mengenai tenaga kerja, pengertian dan jenis-jenis pengangguran, konsep pertumbuhan ekonomi,, konsep pertumbuhan penduduk, konsep investasi, dan teori upah, serta studi literature dan hipotesa.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan data dan sumber data, pembentukan model, definisi operasional variabel dan metode pengolahan dan analisis data.

Bab IV : TINJAUAN UMUM

Menguraikan keadaan perekonomian Sumatera Barat, serta perkembangan upah minimum regional dan pertumbuhan ekonomi serta tingkat investasi swasta dan pasar tenaga kerja di Sumatera Barat.

Bab V : PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Menguraikan tentang hasil penemuan empiris dari variabel-variabel yang diuji dan menjelaskan beberapa implikasi kebijakan.

Bab VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil empiris dari analisa yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat yang mana disini adalah pengangguran di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y_d) mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% maka akan menambah pengangguran sebesar 0.466 persen. Sebaliknya jika terjadi penurunan ekonomi maka akan mengurangi pengangguran sebesar 0.466 persen.
2. Variabel Pertumbuhan Penduduk (J_p) memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Ini mungkin saja terjadi karena proporsi angkatan kerja di sumbar lebih besar dari ketersediaan lapangan kerja yang ada, atau bisa jadi kualitas dari angkatan kerja sumbar tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk daerah Sumbar merupakan beban bagi pembangunan ekonomi.
3. Variabel Investasi Swasta (I_s) memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh proporsi investasi swasta yang tidak begitu besar di Sumatera Barat yang mana secara keseluruhan mengalami penurunan tingkat investasi,

yang salah satu penyebabnya adalah terjadinya krisis moneter yang menjadi krisis ekonomi di Indonesia secara umum dan Sumatera Barat secara khusus.

4. Variabel Upah Minimum Regional (w) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Setiap kenaikan UMR sebesar 1% maka akan mengurangi pengangguran sebesar 1.390 persen. Sebaliknya jika terjadinya penurunan UMR maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 1.390 persen dengan asumsi *ceteris paribus*.

6.2 Saran

Untuk memacu perkembangan perekonomian daerah, pemerintah daerah harus bertindak sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian, efesiensi pelayanan publik dapat tercapai bila pungutan yang dilakukan sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat. Dengan efesiensi pelayanan publik akan tercapai peningkatan perekonomian, karena pelayanan publik pemerintah bersifat saling melengkapi dengan investasi atau aktifitas ekonomi lainnya di daerah. Untuk itu perlu perencanaan ekonomi yang matang berkaitan dengan aturan dana perimbangan dengan memperhatikan akses-akses negatif akibat perilaku pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

1. Dari segi Pertumbuhan Ekonomi, penanaman modal disektor industri hendaknya bersifat padat karya. Dengan pengoptimalan sumber-sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat pendidikan yang bervariasi

dan dapat dilatih sesuai dengan keinginan pasar kerja, maka selain akan meningkatkan pendapatan daerah juga akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran.

2. Dari segi Pertumbuhan Penduduk, perlunya kebijaksanaan yang ditekankan pada pencapaian mutuketerampilan dan produktifitas tenaga kerja melalui pemberian pelatihan-pelatihan kursus keterampilan dan keahlian secara intensif ataupun dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan. Penduduk yang bermutu dan memiliki keterampilan serta terlatih ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Selain itu, penambahan jumlah penduduk harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah daerah. Akibat yang timbul dari peningkatan jumlah penduduk adalah penambahan jumlah tenaga kerja baru. Jika tenaga kerja baru ini tidak dapat terserap di pasar tenaga kerja, maka akan menambah jumlah pengangguran yang telah ada. Untuk itu program keluarga berencana perlu dilaksanakan lebih gencar lagi dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa “banyak anak banyak rezeki” adalah tidak benar.
3. Dari segi tingkat investasi swasta, sebaiknya dilakukan evaluasi ulang mengenai prosedur administrasi penanaman modal. Prosedur yang diharapkan tidak berbelit-belit dan birokratis, sehingga para investor lebih mudah dalam administrasi penanaman modalnya. Keamanan berinvestasi baik ditinjau dari pihak masyarakat maupun pemerintah di daerah juga menjadi penentu mau atau tidaknya investor melakukan investasi. Menjaga

isu-isu tentang daerah baik isu social, ekonomi maupun politik yang akan mempengaruhi perkembangan investasi di daerah tersebut.

4. Dari segi upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah, diharapkan dapat diterapkan secara nyata. Hal ini tentu saja perlu ada pengawasan dalam pelaksanaannya baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat (perusahaan/pemberi upah). Diharapkan dari kebijakan upah yang dikeluarkan ini tidak menurunkan tingkat kesejahteraan tenaga kerja tanpa harus mengurangi penyerapan tenaga kerja sebagai konsekuensi dari penetapan upah yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, 1997: *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Penerbit BP STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Informasi Ketenagakerjaan*, Padang: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik , (2000-2010): *Sumatera Barat Dalam Angka*, Padang: Badan Pusat Statistik.
- Baltagi, Badi H. dkk, 2011: *The Turkish Wage Curve: Evidence from the Household Labor Force Survey*, Working Paper No: 11/o6, Central Bank of The Republic of Turkey.
- Blomstrom, Magnus & Ari Kokko, 2000: *Outward Investment, Employment and Wages In Swedish Multinationals*, The European Institute of Japanese Studies.
- Boediono, 1999: *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Penerbit BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Boediono, 2001: *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Makro, Edisi Keempat*, Penerbit BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dumairy, 1996: *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Elfindri, 2001: *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Penerbit Andalas University Press, Padang.
- Elfindri, dan Nasri Bachtiar.2004: *Ekonomi Ketenagakerjaan*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- [Garis Besar Haluan Negara \(GBHN\).](#)
- Gujarati, Danodar, 2002: *Ekonometrika Dasar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hakro, Ahmed Nawaz, 2009: *Size of Government and Growth Rate of Per Capita Income in Selected Asian Developing Economics*, International Research Journal of Finance and Economics.

- Hoppe, Hans-Hermann, 2003: *Teori Umum Keynes Dalam Pandangan Misesian*. Institut Ludwig von Mises.
- Hussain, dkk, 2010: *A Coherent Relationship between Economic Growth and Unemployment: An Empirical Evidence from Pakistan*, International Journal of Human and Social Sciences.
- Lembaga Demografi UI, 1981: *Dasar-dasar Demografi*. Lembaga Penerbit FEUI: Jakarta.
- Lipsey, Richard G. dkk, 1991: *Pengantar Makroekonomi, Edisi Kedelapan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997: *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Melayu, Hasibuan, 2003: *Manajemen SDM*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Malik, dkk, 2011: *Demographic Transition and Economic Growth in Pakistan*, European Journal of Scientific Research.
- Mankiw, N. Gregory, 2003: *Teori Makro Ekonomi, Edisi Kelima*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nawi, Marnis, 1990: *Metodologi Penelitian*. Penerbit FPIPS IKIP, Padang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.8, Tahun 1981, Tentang *Perlindungan Upah*.
- Ritonga, 2003: *Ekonomi SMA*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, 1992: *Makro Ekonomi, Edisi Keempatbelas*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman.J. 1998: *Pengantar Ilmu Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Penerbit LPFE-UI, Jakarta.
- Sodipe, Oluyomi Ayoyinka & Oluranti Isaiah Ogunrinola, 2011: *Employment and Economic Growth Nexus in Nigeria*, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 11.
- Sofyardi. 1999: *Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Pusat Studi Ekonomi Koperasi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Padang.

- Sukirno, Sadono. 2000: *Makro Ekonomi Modern*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2004: *Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi Ketiga*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supratikno, Hendrawan, dkk, 1994: *Pengembangan Industri Kecil di Indonesia*.
- Tambunan, Tulus H. 2001: *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1990: *Upah Minimal dan Serikat Pekerja*, Penerbit Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1996: *Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit LP-FEUI, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2000: *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- World Bank, 2003: Kota-kota dalam Transisi : *Tinjauan Sektor Perkotaan pada Era Desentralisasi di Indonesia*, Urban Development Working Papers no.7.
- www.bpssumbar.go.id, *Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat, 2010*.
- www.depnakertrans.go.id
- www.sumbarprov.go.id , *Profil Provinsi Sumatera Barat (Oktober, 2008)*.
- www.sumbarprov.go.id, *BKPMd Sumatera Barat: Realisasi PMDN dan PMA Sumatera Barat, 2010*.